



BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang menyajikan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2023.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 merupakan Laporan Keuangan SKPD yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 5 (lima) laporan, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBD; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Laporan Keuangan SKPD tersebut disampaikan kepada SKPD, untuk selanjutnya dilakukan konsolidasi hingga siap menjadi LKPD.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan SKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SKPD, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan jumlah laporan akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana jumlah laporan akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi jumlah laporan akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;



- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan jumlah laporan akuntansi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2006;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang
14. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang;

1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah



- 3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - 3.1.1 Pendapatan –LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan –LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas Dana
 - 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
- Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
- Bab V Penutup



BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan kinerja. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran negara Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Tahun 2019 Nomor 6322) pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang diuraikan dalam Lampiran Laporan Ikhtisar Pencapaian Kinerja.

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi APBD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2023

| No. | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-----|---|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | Pendapatan-LRA | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Belanja Operasi | 8.940.615.596 | 7.800.524.284 | 87,25 |
| 3 | Belanja Modal | 263.853.283 | 252.464.300 | 95,68 |
| 4 | Surplus/Defisit | (9.204.468.879) | (8.052.988.584) | 87,49 |
| 5 | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | (9.204.468.879) | (8.052.988.584) | 87,49 |

Tabel 2.1 menggambarkan pencapaian kinerja keuangan secara umum.

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan dan Beban LO

| No. | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (%) |
|-----|------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Pendapatan-LO | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Beban | 9.807.451.437 | 10.130.176.054 | (3,19) |
| 3 | Surplus/Defisit dari Operasi | (9.807.451.437) | (10.130.176.054) | 3,19 |

Tabel 2.2 menggambarkan Realisasi Pendapatan Operasional-LO pada TA 2023

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah pada belanja Ribbon Fargo terdapat selisih harga di DPA dan harga riil dimana harga di DPA 20% lebih tinggi dari harga riil. Sehingga penyerapan anggaran tidak bisa maksimal meskipun secara quantity sudah terserap 100%.

Selain itu terdapat belanja yang tidak bisa diprediksi seperti biaya ongkir, dimana dalam memperoleh blanko KTP kadang dikirim via ekspedisi, namun kadang kami diwajibkan untuk mengambil langsung ke Jakarta.



BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

Tabel 3.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

| Uraian | Jumlah 2023 (Rp) | | | Realisasi 2022 |
|---|----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | (%) | (Rp) |
| PENDAPATAN DAERAH | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BELANJA DAERAH | 9.204.468.879 | 8.052.988.584 | 87,49 | 7.780.036.955 |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | 9.204.468.879 | 8.052.988.584 | 87,49 | 7.780.036.955 |
| Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9.204.468.879 | 8.052.988.584 | 87,49 | 7.780.036.955 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9.204.468.879 | 8.052.988.584 | 87,49 | 7.780.036.955 |
| BELANJA OPERASI | 8.940.615.596 | 7.800.524.284 | 87,25 | 7.678.136.955 |
| Belanja Pegawai | 4.590.962.130 | 3.746.201.119 | 81,60 | 4.317.544.432 |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.349.653.466 | 4.054.323.165 | 93,21 | 3.360.592.523 |
| BELANJA MODAL | 263.853.283 | 252.464.300 | 95,68 | 101.900.000 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 263.853.283 | 252.464.300 | 95,68 | 101.900.000 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |



3.1 Rincian Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1 Pendapatan - LRA

| Anggaran TA 2023 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0,- | 0,- | 0,- |

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2023, Jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp 0,-. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha maka yang mengembalikan pengelolaan jasa tarif retribusi parkir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan.

3.1.2 Belanja

| Anggaran TA 2023 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 9.204.468.879 | 8.052.988.584 | 11.359.373.047 |

Realisasi belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp 8.052.988.584,- atau sebesar 87,49% dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 9.204.468.879,-. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 273.351.279,- atau sebesar 35,13 %. Rincian anggaran dan belanja daerah tahun 2023, yaitu:

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

| No | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | % | Realisasi 2022 (Rp) |
|---------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | Belanja Operasi | 8.940.615.596 | 7.800.524.284 | 87,25 | 7.677.737.305 |
| 2 | Belanja Modal | 263.853.283 | 252.464.300 | 95,68 | 101.900.000 |
| Jumlah | | 9.204.468.879 | 8.052.988.584 | 87,49 | 7.779.637.305 |

1. Belanja Operasi

Anggaran belanja operasi tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8.940.615.596,- dan realisasinya sebesar Rp, 7.800.524.284,- atau sebesar 87,25%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2023:

Tabel 3.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

| No | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | % | Realisasi 2022 (Rp) |
|---------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 4.590.962.130 | 3.746.201.119 | 81,60 | 4.317.144.782 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.349.653.466 | 4.054.323.165 | 93,21 | 3.360.592.523 |
| Jumlah | | 8.940.615.596 | 7.800.524.284 | 87,25 | 7.677.737.305 |

Rincian untuk masing-masing jenis belanja operasi diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun 2023 adalah sebesar Rp 3.746.201.119,- atau sebesar 81,60 %, yang terdiri dari:

Tabel 3.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

| No | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | % | Realisasi 2022 (Rp) |
|----|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|
| 1 | Gaji dan Tunjangan ASN | 2.232.177.353 | 1.707.931.948 | 76,51 | 1.960.222.253 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 2.229.694.777 | 1.909.179.171 | 85,63 | 2.234.285.529 |



| No | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | % | Realisasi 2022 (Rp) |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 3 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 129.090.000 | 129.090.000 | 100 | 122.637.000 |
| Jumlah | | 4.590.962.130 | 3.746.201.119 | 81,60 | 4.317.144.782 |

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.054.323.165,- yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

| No | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | % | Realisasi 2022 (Rp) |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 1 | Belanja Barang | 2.221.223.964 | 2.024.489.700 | 91,14 | 1.588.636.720 |
| 2 | Belanja Jasa | 1.440.752.000 | 1.348.268.784 | 93,58 | 1.149.938.347 |
| 3 | Belanja Pemeliharaan | 347.504.500 | 342.176.033 | 98,47 | 294.083.800 |
| 4 | Belanja Perjalanan Dinas | 340.173.002 | 339.388.648 | 99,77 | 327.933.656 |
| Jumlah | | 4.349.653.466 | 4.054.323.165 | 93,21 | 3.360.592.523 |

2. Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran belanja modal tahun 2023 adalah sebesar Rp. **263.853.283,-** sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp **252.464.300,-** atau sebesar 95,68 %.. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2023:

Tabel 3.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

| No. | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | % | Realisasi 2022 (Rp) |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 1 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 263.853.283 | 252.464.300 | 95,68 | 101.900.000 |
| 2 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Jumlah | | 263.853.283 | 252.464.300 | 95,68 | 101.900.000 |

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 252.464.300,- dari anggaran sebesar Rp.263.853.283,- sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp.11.388.983,- menyesuaikan harga riil. Dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

| No. | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | % | Realisasi 2022 (Rp) |
|---------------|---|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 1 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 2.353.200 | 2.350.000 | 99,86 | 0 |
| 2 | Belanja Modal Mebel | 61.738.200 | 61.000.000 | 98,80 | 0 |
| 3 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 74.085.600 | 74.080.000 | 99,99 | 0 |
| 4 | Belanja Modal Peralatan Jaringan | 0 | 0 | 0 | 101.900.000 |
| 5 | Belanja Modal Personal Computer | 49.803.000 | 46.860.000 | 94,09 | 0 |
| 6 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 75.873.283 | 68.174.300 | 89,85 | 0 |
| Jumlah | | 263.853.283 | 252.464.300 | 95,68 | 101.900.000 |

b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tidak ada Belanja modal aset lainnya pada tahun 2023.

Tabel 3.8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya

| No. | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | % | Realisasi 2022 (Rp) |
|---------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Jumlah | | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

3.1.3 Pendapatan -LO

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--------------------|--------------------|
| 0,- | 0,- |

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Jombang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,- .

3.1.4 Beban

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|----------------------|-----------------------|
| 9.842.871.437 | 10.130.176.054 |

Pengakuan beban pada Tahun 2023 sebesar Rp. **9.842.871.437,-** dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rincian Beban-LO

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Beban Pegawai | 3.746.201.119,00 | 4.317.144.782 |
| 2 | Beban Barang dan Jasa | 5.251.410.877,00 | 4.670.373.834 |
| 3 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 842.109.441,00 | 1.142.657.438 |



| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|----|---------------|----------------------|-----------------------|
| | Jumlah | 9.842.871.437 | 10.130.176.050 |

Dapat dijelaskan bahwa pengakuan beban pada tahun 2023 sebesar Rp, 9.842.871.437,- mengalami penurunan sebesar Rp.287.304.613,- atau 2,84% dibandingkan dengan pengakuan beban tahun 2022 yakni sebesar Rp, 10.130.176.050,-

1. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nilai beban pegawai pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.746.201.119,- terdiri dari:

Tabel 3.10 Rincian Beban Pegawai

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 1.707.931.948 | 1.960.222.253 |
| 2 | Beban Tambahan Penghasilan ASN | 1.909.179.171 | 2.234.285.529 |
| 3 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 129.090.000 | 122.637.000 |
| | Jumlah | 3.746.201.119 | 4.317.144.782 |

Rincian masing-masing Beban Pegawai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Beban Gaji dan Beban Tunjangan

Beban Gaji dan Beban tunjangan sebesar Rp. 1.707.931.948,- terdiri dari:

Tabel 3.11 Rincian Beban Gaji dan Beban Tunjangan

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Beban Gaji Pokok ASN | 1.292.218.476 | 1.481.523.360 |
| 2 | Beban Tunjangan Keluarga ASN | 132.112.694 | 155.712.696 |
| 3 | Beban Tunjangan Jabatan ASN | 164.990.000 | 182.970.000 |
| 4 | Beban Tunjangan Fungsional ASN | 13.500.000 | 15.120.000 |
| 5 | Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN | 17.930.000 | 20.080.000 |
| 6 | Beban Tunjangan Beras ASN | 71.985.480 | 87.773.040 |
| 7 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 4.671.565 | 4.851.272 |
| 8 | Beban Pembulatan Gaji ASN | 16.533 | 19.340 |
| 9 | Beban Iuran JKK ASN | 2.626.793 | 3.043.161 |
| 10 | Beban Iuran JKM ASN | 7.880.407 | 9.129.384 |
| | Jumlah | 1.707.931.948 | 1.960.222.254 |

b. Beban Tambahan Penghasilan PNS

Beban Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp **1.909.179.171,-** terdiri dari:

Tabel 3.12 Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|----|---|-------------|-------------|
| 1 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 694.637.852 | 694.637.852 |
| 2 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 218.552.944 | 218.552.944 |
| 3 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 0 | 0 |



| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| 4 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 1.321.094.733 | 1.321.094.733 |
| Jumlah | | 2.234.285.529 | 1.921.343.520 |

- c. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2023 sebesar Rp **122.637.000,-** terdiri dari:

Tabel 3.13 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Beban Honorarium | 121.890.000 | 110.637.000 |
| 2 | Beban Jasa Pengelolaan BMD | 7.200.000 | 12.000.000 |
| Jumlah | | 129.090.000 | 122.637.000 |

2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada tahun 2023 sebesar Rp 5.251.410.877,- dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp 4.670.373.834,- maka terdapat kenaikan sebesar Rp, 581.037.043,- atau 12,44%, dengan rincian beban jasa sebagai berikut:

Tabel 3.14 Rincian Beban Barang dan Jasa

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Beban Barang | 3.192.920.495 | 2.898.524.650 |
| 2 | Beban Jasa | 1.349.487.401 | 1.149.831.728 |
| 3 | Beban Pemeliharaan | 369.614.333 | 294.083.800 |
| 4 | Beban Perjalanan Dinas | 339.388.648 | 327.933.656 |
| Jumlah | | 5.251.410.877 | 4.670.373.834 |

Rincian masing-masing Beban Barang dan Jasa tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Beban Barang

Beban Barang sebesar Rp. 3.192.920.495,- terdiri dari:

Tabel 3.15 Rincian Beban Barang

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Beban Barang Pakai Habis | 3.192.920.495 | 2.898.524.650 |
| Jumlah | | 3.192.920.495 | 2.898.524.650 |

Sedangkan rincian dari Beban Barang Habis Pakai sebesar Rp. 3.192.920.495,- terdiri dari:

Tabel 3.16 Rincian Beban Barang Habis Pakai

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|----|---|-----------|------------|
| 1 | Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 0 | 32.998.000 |
| 2 | Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3.800.000 | 80.401.320 |
| 3 | Beban Bahan-Bahan Lainnya | 1.744.000 | 738.000 |
| 4 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | 0 |
| 5 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 3.735.500 | 0 |



| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| 6 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.322.578.100 | 688.398.600 |
| 7 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 95.775.700 | 75.108.600 |
| 8 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 268.221.500 | 390.397.625 |
| 9 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 10 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.065.469.595 | 1.568.915.905 |
| 11 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | (228.000,00) | 5.000 |
| 12 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1.682.500 | 10.221.600 |
| 13 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 117.551.600 | 750.000 |
| 14 | Beban Obat-Obatan-Obat | 625.000 | 0 |
| 15 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | 186.115.000 | 39.490.000 |
| 16 | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | 0 |
| 17 | Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 122.850.000 | 0 |
| 18 | Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) | 0 | 8.100.000 |
| Jumlah | | 3.192.920.495 | 2.898.524.650 |

b. Beban Jasa

Beban Jasa sebesar Rp. 1.349.487.401,- terdiri dari:

Tabel 3.17 Rincian Beban Jasa

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Beban Jasa Kantor | 1.136.515.435 | 993.218.342 |
| 2 | Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 54.421.966 | 27.013.386 |
| 3 | Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 22.050.000 | 0 |
| 4 | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 0 | 129.600.000 |
| 5 | Beban Sewa Aset Tetap Lainnya | 31.500.000 | 0 |
| 6 | Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 105.000.000 | 0 |
| Jumlah | | 1.349.487.401 | 1.149.831.728 |

Sedangkan Rincian Beban Jasa kantor sebesar Rp. 1.136.515.435,-, terdiri dari :

Tabel 3.18 Rincian Beban Jasa Kantor

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|----|---|-------------|-------------|
| 1 | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 118.900.000 | 13.500.000 |
| 2 | Beban Jasa Tenaga Administrasi | | 641.200.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 590.400.000 | |
| 3 | Beban Jasa Tenaga Kebersihan | 56.102.000 | 0 |
| 4 | Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | | 1.000.000 |
| 5 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | | 39.200.000 |
| 6 | Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 900.000 | 1.575.000 |



| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|--|----------------------|--------------------|
| 7 | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | 19.810.000 |
| 8 | Beban Tagihan Telepon | 1.377.940 | 1.619.372 |
| 9 | Beban Tagihan Listrik | 177.408.480 | 161.028.002 |
| 10 | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 24.555.000 | 4.180.000 |
| 11 | Beban Paket/Pengiriman | 4.454.648 | 2.727.618 |
| 12 | Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 11.112.300 | 15.258.350 |
| 13 | Beban Lembur | 151.305.067 | 92.120.000 |
| Jumlah | | 1.136.515.435 | 993.218.342 |

Sedangkan Rincian Beban Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 54.421.966, terdiri dari :
Tabel 3.19 Rincian Beban Iuran Jaminan/Asuransi

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 48.248.560 | 26.010.138 |
| 2 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 2.876.925 | 445.888 |
| 3 | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 3.296.481 | 557.360 |
| Jumlah | | 54.421.966 | 27.013.386 |

c. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp.0,- terdiri dari:

Tabel 3.20 Rincian Beban Pemeliharaan

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|--------------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 0 | 129.600.000 |
| Jumlah | | 0 | 129.600.000 |

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 369.614.333,00,- terdiri dari:

Tabel 3.21 Rincian Beban Pemeliharaan

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 328.063.133 | 294.083.800 |
| 2 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 41.551.200 | 0 |
| Jumlah | | 369.614.333 | 294.083.800 |

Sedangkan Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 328.063.133, terdiri dari :

Tabel 3.22 Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|----|--|-------------|-------------|
| 1 | Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | 9.335.000 | 0 |
| 2 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 139.400.050 | 103.491.500 |
| 3 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 0 | 123.736.300 |
| 4 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | 1.200.000 | 6.800.000 |



| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|--|--------------------|--------------------|
| 5 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | 18.248.000 | 44.906.000 |
| 6 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 10.967.000 | 15.150.000 |
| 7 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 144.000 | 0 |
| 8 | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 39.420.000 | 0 |
| 9 | Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 81.910.783 | 0 |
| 10 | Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 27.438.300 | 0 |
| Jumlah | | 328.063.133 | 294.083.800 |

Sedangkan Beban Pemeliharaan Gedung sebesar Rp. 41.551.200,00,- terdiri dari:

Tabel 3.21 Rincian Beban Pemeliharaan Gedung

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|--|-------------------|-----------|
| 1 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 41.551.200 | 0 |
| 2 | | | 0 |
| Jumlah | | 41.551.200 | 0 |

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 339.388.648,00,- terdiri dari:

Tabel 3.23 Rincian Beban Perjalanan Dinas

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 339.388.648 | 327.933.656 |
| Jumlah | | 339.388.648 | 327.933.656 |

Rincian Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 339.388.648,- terdiri dari:

Tabel 3.17 Rincian Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 230.388.648 | 160.433.656 |
| 2 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 109.000.000 | 167.500.000 |
| Jumlah | | 339.388.648 | 327.933.656 |

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Kabupaten Jombang pada tahun 2023 sebesar Rp. 842.109.441,- dengan rincian beban penyusutan dan amortisasi sebagai berikut:

Tabel 5.45 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi



| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|---|--------------------|----------------------|
| 1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 775.956.007 | 1.066.543.504 |
| 2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 29.849.484 | 29.849.484 |
| 3 | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 4.033.950 | 4.033.950 |
| 4 | Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 32.270.000 | 42.230.500 |
| Jumlah | | 842.109.441 | 1.646.415.244 |

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp. 775.956.007,- terdiri dari

Tabel 3.18 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|----|---|--------------|--------------|
| 1 | Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa | 428.572 | 0 |
| 2 | Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa | 0 | 1.123.287 |
| 3 | Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 0 | 0 |
| 4 | Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 0 | 26.775.143 |
| 5 | Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 14.104.000 | 22.934.000 |
| 6 | Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 14.655.200 | 14.185.200 |
| 7 | Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel | 25.466.400 | 13.266.400 |
| 8 | Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 12.775.200 | 19.975.200 |
| 9 | Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 48.858.485 | 39.257.595 |
| 10 | Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat | 0 | 0 |
| 11 | Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film | 27.600.000 | 30.441.360 |
| 12 | Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone | 600.000 | 600.000 |
| 13 | Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum | 800.000 | 800.000 |
| 14 | Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer | 125.827.475 | 251.681.690 |
| 15 | Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer | 1.075.000 | 1.075.000 |
| 16 | Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 296.457.425 | 372.869.908 |



| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|--|--------------------|----------------------|
| 17 | Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan | 49.308.750 | 115.058.721 |
| 18 | Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 147.999.500 | 146.500.000 |
| 19 | Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Jumlah | | 775.956.007 | 1.066.543.504 |

- b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp. 29.849.484,- terdiri dari

Tabel 3.19 Rincian Beban Gedung dan Bangunan

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 25.573.304 | 25.573.304 |
| 2 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool | 1.995.320 | 1.995.320 |
| 3 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir | 515.720 | 515.720 |
| 4 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 613.820 | 613.820 |
| 5 | Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 0 | 0 |
| 6 | Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Kerja – Bangunan Gudang | 1.151.320 | 1.151.320 |
| Jumlah | | 29.849.484 | 29.849.484 |

- c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 sebesar Rp. 4.033.950,- terdiri dari

Tabel 3.20 Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|---|------------------|------------------|
| 1 | Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi | 3.497.800 | 3.497.800 |
| 2 | Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi | 536.150 | 536.150 |
| Jumlah | | 4.033.950 | 4.033.950 |

- d. Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak tahun 2023 sebesar Rp. 32.270.000,- terdiri dari

Tabel 3.21 Rincian Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud



| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software | 32.270.000 | 42.230.500 |
| Jumlah | | 32.270.000 | 42.230.500 |

3.1.5 Aset

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
(Rp) (Rp)

4.823.519.702 6.612.183.938

Jumlah Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 4.823.519.702,- terdiri dari:

Tabel 3.22 Rincian Aset

| No | Uraian | 31 Desember 2023 (Rp) | 31 Desember 2022 (Rp) |
|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Aset Lancar | 2.691.325.575 | 3.862.906.370 |
| 2 | Aset tetap | 2.090.224.127 | 2.675.037.568 |
| 3 | Aset Lainnya | 41.970.000 | 74.240.000 |
| Jumlah | | 4.823.519.702 | 6.612.183.938 |

a. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.691.325.575,- yang merupakan persediaan barang habis pakai yang terdiri dari:

Tabel 3.23 Rincian Aset Lancar

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Alat Tulis Kantor | 1.897.800 | 688.000 |
| 2 | Kertas dan Cover | 380.446.650 | 393.431.150 |
| 3 | Bahan Cetak | 481.479.375 | 575.621.875 |
| 4 | Bahan Komputer | 1.827.201.750 | 2.892.671.345 |
| 5 | Perabot Kantor | 300.000 | 72.000 |
| 6 | Alat Listrik | 0 | 422.000 |
| JUMLAH | | 2.691.325.575 | 3.862.906.370 |

b. Aset Tetap

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
(Rp) (Rp)

2.090.224.127 2.675.037.568

Aset Tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari:

Tabel 3.24 Rincian Aset Tetap

| NO | URAIAN | 31 Desember 2023 (Rp) | 31 Desember 2022(Rp) |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 10.408.723.629 | 10.218.281.629 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 1.630.633.630 | 1.630.633.630 |
| 3 | Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 161.358.000 | 161.358.000 |
| 4 | Akumulasi Penyusutan | (10.110.491.132) | (9.335.235.691) |
| JUMLAH ASET TETAP | | 2.090.224.127 | 2.675.037.568 |

Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin



Dasar penilaian aset tetap peralatan dan mesin yaitu harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin siap digunakan.

Tabel 3.25 Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

| URAIAN | 31 Desember 2023 (Rp) | 31 Desember 2022 (Rp) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Electric Generating Set | 177.500.000 | 177.500.000 |
| Pompa | 7.863.000 | 7.863.000 |
| Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 820.029.400 | 820.029.400 |
| Kendaraan Bermotor Penumpang | 187.426.000 | 187.426.000 |
| Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 219.955.000 | 219.955.000 |
| Mesin Ketik | 0 | 4.200.000 |
| Alat Reproduksi (Penggandaan) | 25.005.196 | 25.005.196 |
| Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 492.380.000 | 492.380.000 |
| Alat Kantor Lainnya | 105.866.000 | 103.516.000 |
| Mebel | 326.342.000 | 265.342.000 |
| Alat Pembersih | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Alat Pendingin | 212.170.500 | 212.170.500 |
| Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 381.778.080 | 307.698.080 |
| Alat Pemadam Kebakaran | 2.125.000 | 2.125.000 |
| Meja Kerja Pejabat | 14.400.000 | 14.400.000 |
| Kursi Kerja Pejabat | 21.000.000 | 21.000.000 |
| Peralatan Studio Video dan Film | 174.221.800 | 185.571.800 |
| Alat Komunikasi Telephone | 12.955.000 | 12.955.000 |
| Alat Kedokteran Umum | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Personal Computer | 2.160.708.530 | 2.148.353.530 |
| Peralatan Mini Computer | 109.300.000 | 109.300.000 |
| Peralatan Personal Computer | 3.457.210.676 | 3.407.011.676 |
| Peralatan Jaringan | 845.489.447 | 845.489.447 |
| Peralatan Komputer Lainnya | 594.998.000 | 589.000.000 |
| Peralatan Permainan | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Jumlah | 10.408.723.629 | 10.218.281.629 |

2. Gedung dan Bangunan

Dasar penilaian aset tetap gedung dan bangunan yaitu harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah diubah dalam Peraturan Bupati Jombang nomor 887 tahun 2022 dalam Bab 12, D angka 2.a.4 tentang nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan.

Gedung dan bangunan milik dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jombang yang terdiri dari:

Tabel 3.26 Rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

| Jenis | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|-------|------------------|------------------|
|-------|------------------|------------------|



| | (Rp) | (Rp) |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bangunan Gedung Kantor | 1.416.824.639,- | 1.416.824.639,- |
| Bangunan Gudang | 57.566.000,- | 57.566.000,- |
| Bangunan Gedung Garasi/Pool | 99.766.000,- | 99.766.000,- |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 30.691.000,- | 30.691.000,- |
| Bangunan Parkir | 25.786.000,- | 25.786.000,- |
| Jumlah | 1.630.633.00,- | 1.630.633.00,- |

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dasar penilaian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yaitu harga perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah diubah dalam Perbup 87 tahun 2022 dalam Bab 12 bahwa nilai kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sesuai dengan tabel D angka 2.a.5.

Aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang terdiri dari:

Tabel 3.27 Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan

| Jenis | 31 Desember 2023 (Rp) | 31 Desember 2022 (Rp) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Instalasi Gardu Listrik | 139.912.000,- | 139.912.000,- |
| Jaringan Listrik | 21.446.000,- | 21.446.000,- |
| Jumlah | 161.358.000,- | 161.358.000,- |

3. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa manfaat sesuai dengan Perbup 53 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi pada Bab 12 huruf D.4, masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28 Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

| Kodefikasi | | | | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|----------|----------|----|--|----------------------|
| 1 | 3 | | | ASET TETAP | |
| 1 | 3 | 2 | | Peralatan dan Mesin | |
| 1 | 3 | 2 | 01 | Alat-Alat Besar Darat | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 02 | Alat-Alat Besar Apung | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 03 | Alat-Alat Bantu | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 04 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 05 | Alat Angkutan Berat Tak Bermotor | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 06 | Alat Angkut Apung Bermotor | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 07 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 08 | Alat Angkut Bermotor Udara | 20 |
| 1 | 3 | 2 | 09 | Alat Bengkel Bermesin | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | Alat Bengkel Tak Bermesin | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | Alat Ukur | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | Alat Pengolahan Pertanian | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | Alat Pemelihara Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian | 4 |



| Kodefikasi | | | | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------|
| 1 | 3 | 2 | 14 | Alat Kantor | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | Alat Rumah Tangga | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 16 | Komputer | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | Alat Studio | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | Alat Komunikasi | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 20 | Peralatan Pemancar | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 21 | Alat Kedokteran | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 22 | Alat Kesehatan | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 23 | Unit-Unit Laboratorium | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 24 | Alat Peraga/Praktek Sekolah | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 25 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 26 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 27 | Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 28 | Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 29 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 31 | Senjata Api | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 32 | Persenjataan Non Senjata Api | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 33 | Amunisi | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 34 | Senjata Sinar | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 35 | Alat Keamanan dan Perlindungan | 10 |
| 1 | 3 | 3 | | Gedung dan Bangunan | |
| 1 | 3 | 3 | 01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 03 | Bangunan Menara | 40 |
| 1 | 3 | 3 | 04 | Bangunan Bersejarah | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 05 | Tugu Peringatan | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 06 | Candi | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 07 | Monumen/Bangunan Bersejarah | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 08 | Tugu Peringatan Lain | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 09 | Tugu Titik Kontrol/Pasti | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 10 | Rambu-Rambu | 7 |
| 1 | 3 | 3 | 11 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara | 5 |
| 1 | 3 | 4 | | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | |
| 1 | 3 | 4 | 01 | Jalan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 02 | Jembatan | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 03 | Bangunan Air Irigasi | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 04 | Bangunan Air Pasang Surut | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 05 | Bangunan Air Rawa | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 06 | Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 07 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 08 | Bangunan Air Bersih/Baku | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 09 | Bangunan Air Kotor | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 10 | Bangunan Air | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 11 | Instalasi Air Minum/Air Bersih | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 12 | Instalasi Air Kotor | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 13 | Instalasi Pengolahan Sampah | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 14 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 15 | Instalasi Pembangkit Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 16 | Instalasi Gardu Listrik | 40 |



| Kodefikasi | | | | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|---|---|----|----------------------|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 17 | Instalasi Pertahanan | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 18 | Instalasi Gas | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 19 | Instalasi Pengaman | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 20 | Jaringan Air Minum | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 21 | Jaringan Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 22 | Jaringan Telepon | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 23 | Jaringan Gas | 30 |

Berdasarkan perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp (10.110.491.132,-) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.29 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| Jenis Aset | Saldo 31 Des 2023 | Saldo 31 Des 2022 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Peralatan Dan Mesin | (9.513.284.395) | (8.771.912.388) |
| Gedung Dan Bangunan | (550.616.987) | (520.767.503) |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | (46.589.750) | (42.555.800) |
| Jumlah | (10.110.491.132) | (9.335.235.691) |

c. Aset Lainnya

Aset lainnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang per 31 Desember 2023 meliputi:

Tabel 3.30 Rincian Aset Lainnya

| Jenis | 31-Des-23 (Rp) | 31-Des-22 (Rp) |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Aset Tak Berwujud | 211.152.500 | 211.152.500 |
| Akumulasi Amortisasi | (169.182.500) | (136.912.500) |
| Jumlah | 41.970.000 | 74.240.000 |

3.1.6 Kewajiban

| 31 Desember 2023 (Rp) | 31 Desember 2022 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 15.779.340 | 14.560.723 |

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan. Pada Tahun 2023,

3.1.7 Ekuitas

| 31 Desember 2023 (Rp) | 31 Desember 2022 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 4.807.740.362 | 6.597.623.215 |

Saldo ekuitas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.807.740.362,- dan tahun 2022 sebesar Rp. 6.597.623.215,- mengalami penurunan sebesar Rp. 1.789.882.853,- atau sebesar 27,13 % dari tahun sebelumnya.

3.2 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul

Jumlah Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 4.823.519.702,- terdiri dari:

Tabel 3.22 Rincian Aset



| No | Uraian | 31 Desember 2023 (Rp) | 31 Desember 2022 (Rp) |
|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Aset Lancar | 2.691.325.575 | 3.862.906.370 |
| 2 | Aset tetap | 2.090.224.127 | 2.675.037.568 |
| 3 | Aset Lainnya | 41.970.000 | 74.240.000 |
| Jumlah | | 4.823.519.702 | 6.612.183.938 |

a. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.691.325.575,-, Terdapat penurunan persediaan sebesar Rp. 1,171.580.795,- atau 30,33 % dari tahun 2022 yang merupakan persediaan barang habis pakai yang terdiri dari:

Tabel 3.23 Rincian Aset Lancar

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Alat Tulis Kantor | 1.897.800 | 688.000 |
| 2 | Kertas dan Cover | 380.446.650 | 393.431.150 |
| 3 | Bahan Cetak | 481.479.375 | 575.621.875 |
| 4 | Bahan Komputer | 1.827.201.750 | 2.892.671.345 |
| 5 | Perabot Kantor | 300.000 | 72.000 |
| 6 | Alat Listrik | 0 | 422.000 |
| JUMLAH | | 2.691.325.575 | 3.862.906.370 |

b. Aset Tetap

Aset Tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari:

Tabel 3.24 Rincian Aset Tetap

| NO | URAIAN | 31 Desember 2023 (Rp) | 31 Desember 2022(Rp) |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 10.408.723.629 | 10.218.281.629 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 1.630.633.630 | 1.630.633.630 |
| 3 | Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 161.358.000 | 161.358.000 |
| 4 | Akumulasi Penyusutan | (10.110.491.132) | (9.335.235.691) |
| JUMLAH ASET TETAP | | 2.090.224.127 | 2.675.037.568 |

Terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp. **252.464.300,-** adalah sebagai berikut:

| | | |
|--|----|---------------|
| 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 | Rp | 252.464.300,- |
| 2. Perolehan lainnya yang sah Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 | Rp | 0,- |
| 3. Koreksi Tambah atas Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Sebelumnya | Rp | 0,- |
| 4. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 | Rp | 0,- |
| 5. Reklasifikasi entry belanja modal dari KIB C | Rp | 0,- |
| 6. Reklasifikasi entry belanja modal dari KIB E | Rp | 0,- |
| 7. Reklasifikasi dari Aset Lainnya software | Rp | 0,- |
| 8. Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin antar SKPD Tahun 2023 | Rp | 0,- |



Total Penambahan Nilai Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2023 Rp **252.464.300,-**

Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023 di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Belanja modal aset peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp 252.464.300,- terdiri dari:

Tabel 5.19 Rincian Pengadaan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Tahun 2023

| NO. | URAIAN | NILAI |
|---------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Belanja Printer KIA | 22.900.000 |
| 2 | Belanja Printer | 11.838.000 |
| 3 | Belanja Laptop | 46.860.000 |
| 4 | Mesin Absensi | 2.350.000 |
| 5 | Iris Scanner | 5.998.000 |
| 6 | Board Printer KTP-El | 27.438.300 |
| 7 | TV Wall | 74.080.000 |
| 8 | Meja Rapat | 61.000.000 |
| Jumlah | | 252.464.300 |

Sedangkan pengurangan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp 62.022.300,- berasal dari:

| | | | |
|--|---|-----------|-------------------|
| 1. | Penghapusan aset tetap berdasarkan SK Kepala Daerah | Rp | 34.584.000,- |
| 2. | Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas proses penghapusan Tahun 2022 | Rp | 0,- |
| 3. | Inventarisasi | Rp | 27.438.300 |
| 4. | Non Kapitalisasi Belanja Modal KIB B Tahun 2022 | Rp | |
| 5. | Reklasifikasi keluar ke KIB D | Rp | |
| 6. | Reklasifikasi keluar ke KIB E | Rp | |
| 7. | Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas pengadaan Aset Tak Berwujud (Software) | Rp | |
| 8. | Mutasi Keluar antar SKPD Tahun 2022 | Rp | |
| Pengurangan bersih nilai aset peralatan dan mesin | | Rp | 62.022.300 |

Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp. **62.022.300,-** dirinci sebagai berikut:

- Penghapusan aset berdasarkan SK Sekda No.188/1498.1/415.44/2023 tanggal 13 Desember sebesar Rp.34.584.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.20 Mutasi Kurang Aset Penghapusan Peralatan dan Mesin

| No. | SKPD | Nilai (Rp) | Jenis Barang |
|---------------|---|--|---|
| 1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.200.000,- 11.350.000,- 10.800.000,- 8.234.000,- | Mesin Ketik Layar Film/projector Note Book Printer |
| Jumlah | | 34.584.000,- | |



2. Inventarisasi asset sebesar Rp. 27.438.300,- berdasarkan surat pernyataan No..032/2685/415.39/2023 tanggal 28 Desember 2023.

Tabel 5.21 Mutasi Keluar Inventarisasi Peralatan dan Mesin

| No. | SKPD | Nilai (Rp) | Jenis Barang |
|-----|---|---------------------|----------------------|
| 1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 27.438.300,- | Board Printer KTP-El |
| | Jumlah | 27.438.300,- | |

c. Kewajiban

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar Rp. 15.779.340,- dengan rincian :

| Jenis Kewajiban Jangka Pendek | 31 Desember 2023 (Rp) | 31 Desember 2022 (Rp) |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga | 0,- | 0,- |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 0,- | 0,- |
| Utang Belanja | 15.779.340,- | 14.560.723,- |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 0,- | 0,- |
| Utang Pajak | 0,- | 0,- |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | 15.779.340,- | 14.560.723,- |

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Utang belanja dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, kewajiban kepada masyarakat dan kewajiban kepada pemberi jasa.

Nilai utang belanja sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. **15.779.340,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.31 Rincian Utang Belanja Tahun 2022

| Uraian | 31 Desember 23 (Rp) | 31 Desember 22 (Rp) |
|---|------------------------|------------------------|
| Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon | 113.669 | 117.014 |
| Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik | 15.665.671 | 14.443.709 |
| Jumlah | 15.779.340 | 14.560.723 |



BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Pencapaian Target Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan memiliki indikator pencapaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja TA 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2023 (%) | Realisasi 2023 (%) | Capaian 2023 (%) | Kategori |
|----|--|---|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan | 1 Prosentase Cakupan Penerbitan KK | 93 | 97,17 | 104,48 | Sangat Berhasil |
| | | 2 Prosentase Cakupan Penerbitan KTPel | 96 | 98,74 | 102,86 | Sangat Berhasil |
| | | 3 Prosentase Cakupan Penerbitan KIA | 55 | 59,03 | 107,33 | Sangat Berhasil |
| | | 4 Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran | 95 | 95,61 | 100,64 | Sangat Berhasil |
| | | 5 Prosentase pelaporan data administrasi kependudukan | 100 | 100 | 100 | Sangat Berhasil |
| | | 6 Prosentase Cakupan perjanjian kerjasama pemanfaatan data yang disusun | 59 | 90,63 | 153,60 | Sangat Berhasil |
| | | 7 Prosentase inovasi pelayanan yang diterapkan | 100 | 100 | 100 | Sangat Berhasil |
| 2 | Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan | 8 Persentase Rata-rata capaian kinerja aparatur | 100 | 100 | 100 | Sangat Berhasil |
| | | | | | | |

4.2 Isu-isu Penting Penting Penyelenggaraan Pelayanan

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2023 telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD). Namun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang selama Tahun 2022 adalah:

1. Untuk kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari sebelumnya, dikarenakan adanya kegiatan yang mengikuti program dari Pusat.
2. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar Bidang-Bidang dan Sekretariat di lingkup Dispenduk dan Pencapil pada proses perencanaan;
3. Kurang aktifnya tim teknis dalam penyempurnaan penyusunan dokumen.
4. Sinkronisasi perencanaan Top Down dan Bottom Up
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari Bidang-Bidang kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.
6. Adanya kegiatan koordinasi penelitian dan pengembangan yang muncul diluar jadwal yang telah ditetapkan, sehingga mempengaruhi penyerapan alokasi anggaran.
7. Keterbatasan pegawai dilingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, sehingga pelaksanaan program/kegiatan menjadi kurang maksimal
8. Konsistensi perencanaan program/kegiatan dan penganggaran yang sering berubah - ubah, sehingga mempengaruhi kinerja pelaksanaan APBD tahun 2019.



9. Mekanisme perubahan anggaran kas tribulanan yang terlalu lama, sehingga proses waktu penyerapan mengalami kemunduran dari jadwal yang telah ditetapkan.
10. Data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan bahan RKPD, sangat sulit di dapat.
11. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana;
12. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang, yaitu:

1. Sinkronisasi dan koordinasi terkait keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
2. Mengembangkan model pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga perlu adanya perencanaan yang partisipatif.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dapat mewujudkan konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap perencanaan yang ada;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur perencana;
5. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;
6. Pelaksanaan percepatan pembangunan perdesaan;
7. Koordinasi terpadu berbasis sistem dan komitmen perencanaan dalam kebersamaan;
8. Efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan secara lebih terstruktur dan terorganisir;
9. Peningkatan kontrol masyarakat terhadap kualitas perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
10. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.



BAB V PENUTUP

Laporan CALK ini disusun berdasarkan sistem pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dengan pemeriksaan berkala maupun sewaktu-waktu agar pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang ditetapkan secara efisien dan efektif berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2023.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang merupakan penjelasan dan informasi keuangan Tahun 2023. Bilamana masih ada hal-hal penting lain yang belum masuk dalam laporan ini, akan diadakan perubahan atau tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku laporan ini.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang



Drs. MASDUQI ZAKARIA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196706081994031014



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER**

| PENDAHULUAN | |
|--------------------|--|
| Bab I | Pendahuluan |
| | 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD |
| | 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD |
| | 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD |
| Bab II | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD |
| | 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah |
| | 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| Bab III | Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah |
| | 3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah |
| | 3.1.1 Pendapatan -LRA |
| | 3.1.2 Belanja |
| | 3.1.3 Pendapatan -LO |
| | 3.1.4 Beban |
| | 3.1.5 Aset |
| | 3.1.6 Kewajiban |
| | 3.1.7 Ekuitas Dana |
| | 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah |
| Bab IV | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD |
| Bab V | Penutup |